

**PERANAN KERJASAMA FILIPINA – AS MELALUI PROGRAM NEW  
EDCA (ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT) SITES  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL DI  
KAWASAN LAUT CHINA SELATAN**



**E061201125**

**Muhammad Raffy Rahmat**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN KERJASAMA FILIPINA – AS MELALUI PROGRAM NEW  
EDCA (ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT) SITES  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL DI  
KAWASAN LAUT CHINA SELATAN**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Muhammad Raffy Rahmat**

**E061201125**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERANAN KERJASAMA FILIPINA-AS MELALUI PROGRAM  
NEW EDCA (*ENHANCED DEFENCE COOPERATION  
AGREEMENT*) SITES DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEAMANAN REGIONAL DI KAWASAN LAUT CHINA  
SELATAN

N A M A : MUHAMMAD RAFFY RAHMAT

N I M : E061201125

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

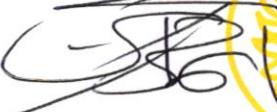
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 Juni 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Agussalim, S.IP, MIRAP.**  
NIP. 197608182005011003

  
**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

  
**Prof. Dr. Phd. Sukri, S.IP, M.Si.**  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERANAN KERJASAMA FILIPINA-AS MELALUI PROGRAM  
NEW EDCA (*ENHANCED DEFENCE COOPERATION  
AGREEMENT*) SITES DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEAMANAN REGIONAL DI KAWASAN LAUT CHINA  
SELATAN

N A M A : MUHAMMAD RAFFY RAHMAT

N I M : E061201125

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 26 Juni 2024.

### TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raffy Rahmat

NIM : E061201125

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 12 Juli 2024



(Muhammad Raffy Rahmat)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raffy Rahmat

NIM : E061201125

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERANAN KERJASAMA FILIPINA – AS MELALUI PROGRAM NEW  
EDCA (ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT) SITES  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN REGIONAL DI  
KAWASAN LAUT CHINA SELATAN**

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar

Pada tanggal : 12 Juli 2024

Yang menyatakan,



(Muhammad Raffy Rahmat)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kerjasama Filipina-AS Melalui Program New EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) Sites Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Regional Di Kawasan Laut Cina Selatan” ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dalam menjalani kehidupan.

Selama masa perkuliahan berlangsung, penulis menyadari bahwa begitu banyak tantangan dan cobaan yang perlu dilalui untuk sampai ke titik ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan syukur terhadap kedua orang tua yang sangat saya cintai yakni Bapak Rahmat Dahlan dan Ibu saya tercinta Ibu Sitti Nurbaya Mukmin, serta adik-adik saya yaitu Muhammad Rifqy Rahmat dan Muhammad Rum Hijaz Rahmat. Kemudian juga rasa syukur dan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang telah memberikan dukungan baik secara mental ataupun finansial kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agussalim Burhanuddin S.IP, MIRAP dan Ibu Nurjannah Abdullah S.IP, MA. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi bimbingan,

arahan, dan dorongan semangat yang telah Bapak dan Ibu berikan selama proses penyusunan dan pembuatan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan selama proses bimbingan berlangsung. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga segala hal baik yang telah dosen pembimbing sampaikan akan menjadi berkah dan semoga Bapak dan Ibu sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga dilindungi oleh Allah SWT.

2. Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D serta Bapak Aswin Buharuddin, S.IP, MA. Selaku ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan arahan dan juga pengetahuan bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga Bapak sekalian dilindungi oleh Allah SWT.
3. Bapak H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR selaku Dosen saya yang juga banyak memberikan wawasan dan pengalamannya serta membantu saya dalam penyusunan skripsi saya dengan memberikan arahnya. Tidak lupa juga dengan cerita-ceritanya di luar topik perkuliahan yang sangat memberikan wawasan. Semoga Bapak dilindungi oleh Allah SWT.
4. Seluruh staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas bentuk bantuan baik secara administrasi maupun hal lainnya selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Teman-teman EB (*Executive Board*) AIESEC in UNHAS 2023/2024 yang telah menemani saya selama perjalanan saya di organisasi ini yang telah memberikan saya pengalaman yang sangat membantu perkembangan saya

baik secara professional maupun personal dan sudah menemani saya selama hidup di bangkuk kuliah, yaitu Nurul Inayah., Hana Muthmainnah Sajidah, Salsabila Nadira, Asnur Bahsyat Asikin, Muhammad Fuad A.P. Mansur, Muhammad Naufal Hakim, dan Cikal Amanda Putri. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalani karirnya ke depannya serta bagi yang masih berjuang skripsi, semoga dilancarkan. Khusus untuk Hana tolong jangan ganggu saya lagi ya, agar keselamatan anda terjaga.

6. Teman-teman saya yang dari Bau-Bau, Tim Bangkala Raya, Abrar, Ibra, Ian, Dion, Alwan, dan George yang telah menjadi teman-teman sekampung halaman yang juga biasa dijadikan tempat kumpul bersama yaitu rumah Pak Dokter.
7. Teman dekat saya anak HI Andi Sabbe Lomotokontu yang sudah membantu dan menemani saya selama masa magang, perkuliahan, urus administrasi dan lain sebagainya, terima kasih sudah menjadi teman saya meskipun kita sering bertengkar kalau bertemu, tetapi penulis sangat bersyukur atas kehadiran Saudari di kehidupan penulis. Semoga diberikan kesehatan dan menjadi Wanita Sunda dan Wanita karir sukses.
8. Teman dan Saudara Saya yaitu Aswin Prasetiawan dan Muhammad Iqbal Agung Pratama. yang telah membantu saya dengan memberikan contoh skripsinya sebagai referensi saya selama proses penyusunan skripsi saya, baik dalam sistem penulisan maupun substansi yang dijadikan contoh oleh penulis. Semoga kedua teman Saya diberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan setelah perkuliahan.

9. Teman dekat saya anak HI Alya Azzahra Sukur yang telah membantu dan menemani saya selama masa perkuliahan, urusan administrasi, dan teman cerita. Semoga dipertemukan dengan lelaki yang bisa menghargai dirinya sampai nanti dan juga tidak dibuat berpikiran berlebihan tentang pasangannya.
10. Teman dan *Gym* saya, Ananda Ashani Fitri Darwis yang telah menemani saya di beberapa kondisi seperti menemani olahraga, jalan-jalan, dan sebagainya seperti hal-hal random lainnya, semangat Nan untuk skripsinya juga, semoga dilancarkan dan tolong berkabar nanti kalau sudah naik atau butuh bantuan dari saya.
11. Seorang perempuan yang kutemui 2 tahun lalu tepatnya di Kantin Kudapan UNHAS pada bulan Oktober 2022, perempuan satu organisasiku yang hampir setahun baru melihatnya di bulan itu, perempuan dengan kulit putih sehat, mata sipit, badan berisi dengan senyum yang manis dengan jilbab yang dikenakannya kala itu. Terima kasih telah meluangkan waktu yang hanya sebentar itu di akhir tahun 2022, meskipun sebentar, tetapi sudah cukup berarti, sayangnya setelah itu kita sudah menjadi asing seperti tidak pernah kenal satu sama lain karena kegosianku, terima kasih juga karena telah memberiku motivasi meskipun secara tidak langsung untuk selalu konsisten berolahraga, kamu telah menjadi *pre-workout* terlarangku hingga detik ini, semoga ke depannya kita berdua bias mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup (🙏).

## ABSTRAK

**Muhammad Raffy Rahmat.2020.** E061201125. “Peran Kerjasama Filipina-AS Melalui Program New EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) Sites Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Regional Di Kawasan Laut China Selatan.” Pembimbing I **Agussalim Burhanuddin, S.IP., MIRAP** Pembimbing II **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.** Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini berfokus pada kerjasama pertahanan Filipina dan Amerika Serikat melalui program EDCA dalam menanggapi tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor perubahan politik luar negeri Filipina yang berpindah arah dari Cina ke Amerika Serikat serta dampak kerjasamanya secara regional di kawasan Laut Cina Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan yang diambil melalui artikel, jurnal, dan buku bacaan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Filipina kembali melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat yang sebelumnya dengan Cina dikarenakan adanya perbedaan pendekatan dari masa Rodrigo Duterte ke Bongbong Marcos. Filipina juga memiliki ketergantungan dalam kebutuhan domestiknya terutama dalam bidang ekonomi dan militernya terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, Filipina memiliki sejarah hubungan baik dengan Amerika Serikat yang telah memberikan banyak bantuan ke Filipina. Dampak Kerjasama EDCA secara regional menciptakan pola keamanan yang dapat memicu terjadinya perang dikarenakan keterlibatan pasukan militer Amerika Serikat dalam operasi militer EDCA di laut Cina Selatan tidak menyebabkan Cina berhenti mempertahankan wilayah yang diklaimnya dan terus melakukan perlawanan terhadap negara-negara yang berusaha melanggar.

**Kata Kunci:** *EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), Kerjasama Pertahanan, Kerjasama Militer, Kerjasama Filipina-Amerika Serikat, Laut Cina Selatan, Cina*

## ABSTRACT

**Muhammad Raffy Rahmat.** 2020. E061201125. “The Role of Philippines-US Cooperation Through the New EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) Sites and Its Impact on Regional Security in the South China Sea.” Supervisor I **Agussalim Burhanuddin, S.IP., MIRAP.** Supervisor II **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.** Department of International Relations. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University.

*This research focuses on defense cooperation between the Philippines and the United States through the EDCA program in response to China's aggressive actions in the South China Sea. The aim of this research is to determine the factors of change in Philippine foreign policy which shifted direction from China to the United States and the impact of regional cooperation in the South China Sea region. The method used is a descriptive qualitative research method with data collection using library research or library research taken through articles, journals and reading books related to the research focus. This research shows that the Philippines is returning to collaborating with the United States previously with China due to differences in approach from the time of Rodrigo Duterte to Bongbong Marcos. The Philippines also has dependence for its domestic needs, especially in the economic and military fields, on the United States. On the other hand, the Philippines has a history of good relations with the United States which has provided a lot of assistance to the Philippines. The regional impact of EDCA cooperation creates a security pattern that could trigger war because the involvement of United States military forces in EDCA military operations in the South China Sea does not cause China to stop defending the territory it claims and continue to fight against countries that try to violate it.*

**Key Word: EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement), Defense Cooperation, Military Cooperation, Philippines-U.S.'s Cooperation, South China Sea, China**

---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR BAGAN.....	16
DAFTAR GAMBAR.....	17
DAFTAR GRAFIK.....	18
DAFTAR LAMPIRAN.....	19
BAB I PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang.....	20
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	25
D. Kerangka Konseptual.....	26
1. Kerjasama Internasional.....	26
2. Kerjasama Pertahanan.....	28
3. Perubahan Kebijakan Luar Negeri.....	29
4. Teori Regional Security Complex.....	32
E. Skema Kerangka Konseptual Penulisan.....	37
F. Metode Penelitian.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Kerjasama Internasional.....	43
B. Kerjasama Pertahanan.....	45
C. Perubahan Kebijakan Luar Negeri.....	48
D. Teori Regional Security Complex.....	50
E. Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM.....	56
A. Konflik Laut Cina Selatan.....	56
B. Hubungan Amerika Serikat dan Filipina.....	64
C. Program EDCA ( <i>Enhanced Defense Cooperation Agreeent</i> ).....	81
BAB IV PEMBAHASAN.....	87

A. Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Filipina dari Cina ke Amerika Serikat.....	87
B. Dampak Kerjasama Filipina-Amerika Serikat melalui program EDCA ( <i>Enhanced Defense Cooperation Agreement</i> ) di Kawasan Laut Cina Selatan..	93
BAB V PENUTUP.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN.....	111

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Jadwal Pertemuan Tingkat Tinggi Filipina dan Amerika Serikat (2022-2023)</b> .....	72
<b>Tabel 2. Bahan Ekspor Pertanian Teratas Amerika Serikat ke Filipina (Angka dalam Jutaan Dolar)</b> .....	80

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1. Kerangka Konseptual Penulisan .....</b>	<b>38</b>
---	-----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Laut Cina Selatan .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 2. Beting Scarborough .....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 3. Perbandingan Finansial Pertahanan Filipina dan Amerika Serikat 2024 .....</b>	<b>74</b>
Gambar 4. Urutan Peringkat Negara dalam Kekuatan Militer.....	75
Gambar 5. Urutan Peringkat Negara dalam Kekuatan Militer.....	77
<b>Gambar 6. Lokasi EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR GRAFIK**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Press Release of EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement)..... 111**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Isu Laut Cina Selatan telah lama menjadi isu yang disorot dunia internasional di mana isu ini secara regional dipertahankan oleh negara-negara yang berada di kawasan tersebut (Sulistyani et al., 2021) . Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang terletak di bagian utara pulau Kalimantan (Borneo), bagian Barat Filipina, bagian Selatan Cina dan bagian Timur Vietnam. Wilayah perairan ini sudah menjadi konflik di beberapa negara yang memiliki kepentingan di dalamnya. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang kaya akan sumber daya alamnya yang menjadi kepentingan bagi setiap negara yang memilikinya. Cadangan minyak dan gas di kawasan ini diperhitungkan oleh pejabat Amerika Serikat yang mengandung kurang lebih sama dengan cadangan minyak di Meksiko dan juga memiliki kemungkinan menjadi cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab (Cobus, 2017).

Di sisi lain, secara geografis, Laut Cina Selatan juga memiliki letak yang sangat strategis di mana kawasan ini menjadi kawasan yang dilalui oleh kapal-kapal lintas negara yang melakukan aktivitas, utamanya menjadi jalur perniagaan Eropa, Amerika dan Asia. Negara-negara yang memiliki kekuatan besar seperti Cina bahkan Amerika Serikat juga ingin berusaha untuk mengambil kendali atas wilayah ini karena dinilai memiliki banyak manfaat khususnya dalam hal ekonomi (Junef, 2018) sehingga banyak negara besar yang ingin mengambil keuntungan di kawasan tersebut, salah satunya adalah Cina.

Dari banyaknya kekayaan yang ada di Kawasan Laut Cina Selatan, kemudian muncul isu yang mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah tersebut secara

regional. Isu yang muncul adalah perebutan sengketa wilayah yang melibatkan banyak negara di kawasan tersebut bahkan negara yang berada di luar kawasan tersebut. Bahkan, isu perebutan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan sudah dibawa di ranah hukum internasional yang hingga saat ini belum menemukan titik terangnya.

Isu ini dimulai dari tindakan Cina yang menyatakan bahwa sebagian besar dari kawasan Laut Cina Selatan merupakan hak milik negara tersebut. Cina menunjukkan tindakan-tindakan yang ofensif dalam operasinya di kawasan Laut Cina Selatan yang mana tindakan tindakannya dinilai melanggar hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan oleh banyak negara, khususnya negara-negara yang berada langsung di kawasan tersebut.

Tindakan Cina dalam mengklaim sepihak kawasan di Laut Cina Selatan salah satunya adalah dengan membuat petanya khusus di kawasan tersebut yang memperluas garis wilayahnya yang sekarang bertambah menjadi 10 garis putus-putus. Sebelumnya, Cina juga pernah mengklaim 9 garis putus-putus di Kawasan yang sama yang biasa disebut *nine-dashed line*. Garis putus-putus ini mencakup wilayah-wilayah negara-negara yang ada di kawasan tersebut (Taufani, 2023). Alasan Cina mengklaim kawasan di Laut Cina Selatan berbeda dengan pandangan negara-negara lain, di mana Cina memberi alasan tentang dasar historisnya, sedangkan negara-negara lain memiliki alasan yang tercantum di Hukum Laut Internasional (UNCLOS) (Cobus, 2017).

Negara-negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya dalam kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina antara lain Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Filipina yang dalam kasus ini juga disebut dengan

*claimant states* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013) Negara-negara yang tergolong *claimant states* memiliki strategi berbeda-beda dalam menanggapi tindakan Cina tersebut. Filipina yang memiliki respon yang unik terhadap tindakan Cina tersebut telah mengalami pasang surut dengan negara *super power* yang juga ikut terlibat dalam isu Laut Cina Selatan yaitu Amerika Serikat dan Cina. Filipina yang juga merasa terancam dengan tindakan Cina, kemudian melakukan kerjasama guna memperkuat kekuatan militernya dengan beraliansi dengan negara yang memiliki kekuatan yang sama dengan negara ancamannya yaitu Cina. Kerjasama ini dilakukan bersama Amerika Serikat sebagai negara yang juga memiliki kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan.

Filipina dan Amerika Serikat merupakan negara yang bersekutu dalam bidang militer yang sudah menjalin hubungannya sejak abad ke-20. Awal dari perjanjian militer kedua negara tersebut adalah ketika Filipina pada saat itu yang menjadi bekas jajahan oleh Amerika Serikat dimerdekakan setelah sempat dijajah oleh Jepang kemudian diambil kembali oleh Amerika Serikat. Melalui perjanjian *Military Assistance Agreement* yang ditandatangani di tahun 1947, Filipina menyetujui kesepakatan untuk memberikan penyewaan lahan kepada Amerika Serikat sebagai pangkalan militernya dengan alasan sebagai tindakan karena telah diberi kemerdekaan oleh Amerika Serikat (Setiawan et al., 2021)

Seiring berjalannya waktu, hubungan antara kedua negara ini mengalami fluktuasi, di mana beberapa tahun kemudian mengalami kerenggangan dan beberapa tahun kemudian lagi kembali erat (Shindy & Ebri, 2016). Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri Filipina sangat bergantung dengan Presiden yang menjabat dalam mengambil langkah dan ketetapan. Hal ini yang akan menentukan

arah negara tersebut untuk bertindak ke depannya, juga latar belakang sang pemimpin seperti kepribadian, pengalaman, dan pengetahuannya (Beatrice, 2020)

Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Filipina pada saat ini dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan adalah kerjasama militer melalui program EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) yang merupakan perjanjian kerjasama militer Filipina dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk merespon krisis alam dan kemanusiaan dan untuk mencapai tujuan modernisasi (U.S. Embassy Manila, 2023a). Lebih rinci nya, EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) merupakan perjanjian yang disepakati Amerika Serikat dan Filipina dengan tujuan memperkuat sistem keamanan kedua negara yang bergerak dalam bidang militer di mana awal perjanjian ini Filipina menawarkan tempat untuk Amerika Serikat yang dapat digunakan sebagai pangkalan militernya yang di saat bersamaan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan pada saat itu masih meningkat (Shindy & Ebri, 2016).

Namun, beberapa tahun kemudian, pada tahun 2016 di masa kepresidenan Rodrigo Duterte, hubungan Filipina dan Amerika Serikat kembali menjadi buruk karena Rodrigo Duterte membuat kebijakan yang lebih pro ke Cina daripada Amerika Serikat. Hal ini dinyatakannya bahwa dalam menangani isu Laut Cina Selatan, Filipina ingin menanggapi isu tersebut dengan mengadakan hubungan bilateral dengan Cina sebagai pihak ancaman, bahkan Filipina tidak ingin membawa isu ini di ranah hukum internasional. Tindakan Rodrigo Duterte juga sangat menunjukkan ketidakberpihakannya dengan Amerika Serikat di mana ia secara paksa menyuruh pergi pasukan militer Amerika Serikat yang melakukan operasi kepelatihan nya di Mindanao dan mencoba untuk menjauhkannya dari

kawasan tersebut (Beatrice, 2020). Di masa kepemimpinan Bongbong Marcos lah kemudian Filipina kembali merubah arah politik luar negerinya dengan Amerika Serikat kembali. Di masa kepemimpinan Bongbong Marcos, EDCA kembali dijalankan dengan tujuan yang sama tetapi dengan strategi yang baru berdasarkan penjelasan dari kesepakatan kedua negara (The Wall Street Journal, 2023a)

Penelitian tentang peranan hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina merupakan hal yang penting dibahas. Kawasan regional di Laut Cina Selatan merupakan salah satu Kawasan yang paling kompleks yang diperselisihkan dalam geopolitik global. Urgensi dari penelitian ini terdapat pada dampak dari keterlibatan program “*New EDCA Sites*” yang berpengaruh cukup besar di Kawasan Laut Cina Selatan. Kerjasama dari kedua negara yang menjalankan program ini yaitu Amerika Serikat dan Filipina memiliki peluang yang dapat berdampak pada dinamika keamanan di Kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu memahami perubahan arah politik luar negeri Filipina dari yang sebelumnya berpihak ke Cina berpindah ke Amerika Serikat, bagaimana program “*New EDCA Sites*” memengaruhi sistem keamanan di Laut Cina Selatan, dan implikasinya terhadap geopolitik regional yang lebih luas. Dengan memahami urgensi penelitian ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan mendukung kerja sama regional yang berkelanjutan.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara khusus membahas tentang faktor-faktor yang mengubah arah politik luar negeri Filipina yang sebelumnya mengarah ke Cina pada masa pemerintahan Duterte sekarang lebih mengarah ke Amerika Serikat pada masa pemerintahan Marcos Jr. yang melanjutkan kembali kerjasamanya melalui program EDCA yang sebelumnya sempat diberhentikan karena keberpihakan Filipina yang lebih mengarah ke Cina, serta dampak keamanan yang muncul dari operasi EDCA secara regional di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan arah politik luar negeri Filipina dari Cina ke Amerika Serikat?
2. Bagaimana dampak dari program New EDCA (*Enhanced Defence Cooperation Agreement*) Sites terhadap keamanan regional di Kawasan Laut Cina Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perubahan politik luar negeri Filipina yang sebelumnya cenderung mengarah ke Cina di masa pemerintahan Rodrigo Duterte kemudian ke Amerika Serikat di masa pemerintahan Bongbong Marcos Jr.
2. Mengetahui dampak dari kerjasama Filipina – Amerika Serikat melalui program “New EDCA (*Enhanced Defence Cooperation Agreement*) Sites” terhadap pola keamanan regional di Kawasan Laut Cina Selatan

## **Adapun manfaat penelitian**

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada akademisi dan peneliti mengenai hubungan bilateral antara Filipina dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks kerjasama militer. Penelitian dapat membantu memperbanyak pemahaman kita tentang dinamika hubungan internasional dan kerjasama keamanan di Asia Pasifik.
2. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pihak yang terkait dalam keamanan di Asia Pasifik mengenai isu-isu keamanan regional di kawasan Laut Cina Selatan. Ini termasuk dampak dari kerjasama militer Filipina-AS terhadap stabilitas regional dan dinamika konflik yang memiliki potensi untuk terjadi.
3. Penelitian ini akan menjadi sumbangan untuk pengetahuan akademik dalam bidang hubungan internasional dan keamanan regional. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lanjutan dan kajian di masa depan bagi akademisi dan peneliti.

#### **D.Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang sudah merdeka dalam mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini bersifat saling menguntungkan untuk semua pihak dalam konteksnya adalah semua negara yang menjalin kerjasama. Kerjasama Internasional bisa berjenis bilateral maupun multilateral (Amanullah, 2021). Kerjasama Internasional secara umum mencakup kerjasama di bidang ekonomi, politik, social, kebudayaan dan pertahanan keamanan yang berdasar pada politik luar negeri dari tiap negara (Trisna, 2022).

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan hasil dari timbulnya ketergantungan atau interdependensi antara negara-negara yang terlibat melalui hubungan yang terjalin. Ketergantungan atau interdependensi tersebut muncul karena adanya hambatan atau kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam konteks hubungan internasional (Tombalisa et al., 2022)

Dalam kerjasama internasional, kesepakatan antar negara yang terlibat harus diberlakukan agar kerjasama tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan yang berlaku. Pada awalnya, kerjasama internasional hanya dipahami sebagai hubungan kerjasama antar negara saja, tetapi seiring berjalannya waktu, actor yang berperan dalam kerjasama internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga actor non-negara atau (*Non-State Actor*) seperti Organisasi Non-Pemerintahan (*Non-Governmental Organization*) atau biasa disingkat NGO (Trisna, 2022).

Di dalam hubungan internasional, ada pendapat yang mengatakan bahwa kerjasama perlu hubungan yang tidak simetris yang berarti dalam kerjasama perlu adanya negara yang sangat berpengaruh, contohnya adalah Amerika Serikat. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Keohane, yang mengatakan bahwa kerjasama tidak selamanya memerlukan kekuatan dari negara yang berpengaruh, walaupun pada awalnya mungkin memiliki ketergantungan kepada negara yang berpengaruh, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rezim internasional mampu mengembangkan kepentingan sendiri bahkan jika kekuatan hegemoni/negara yang berpengaruh mengalami penurunan, dan kerjasama tersebut disebut kerjasama Non-Hegemonik atau Post-Hegemonik, yang walaupun sulit, tetapi memiliki kemungkinan untuk terjadi (Erdmann et al., 2013).

Konsep ini digunakan peneliti di dalam penelitian dengan menjadikan landasan utama mengenai kerjasama antara Filipina dan Amerika Serikat sebagai studi kasus dalam penelitian yang merupakan kedua aktor dari negara berbeda yang menjalankan kerja sama secara bilateral pertahanan keamanan yang berdasar pada politik luar negeri dari tiap negara. Di dalam konsep ini juga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai dinamika hubungan Filipina dan Amerika Serikat.

## **2. Kerjasama Pertahanan**

Hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan menurut Winger (2014) merupakan sebuah cara yang digunakan oleh negara melalui Lembaga pertahanannya dengan cara mengadakan kerjasama dengan Lembaga pertahanan dari negara lain untuk mencapai hasil yang ditujukan, kerjasama pertahanan juga adalah konsep *soft power* yang mengacu pada konsep Nye dalam penjelasannya tentang cara *soft power* dalam memberikan pengaruh kepada targetnya (Susdarwono, 2023).

Jika dilihat dari bentuknya, kerjasama pertahanan adalah bentuk kerjasama yang diadakan dengan formal (*formal cooperation*) antara dua negara atau lebih yang secara umum tidak terikat secara hukum dan bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan semua negara yang terlibat. Di sisi lain, kerjasama pertahanan juga berpotensi untuk membangun kerjasama di bidang lain oleh negara-negara yang bersangkutan (Susdarwono, 2023).

Pada pokoknya, kerjasama pertahanan adalah kerjasama yang dilakukan secara sukarela, tetapi memungkinkan juga dibentuk karena alasan kepentingan

nasional masing masing negara yang terlibat. Ada beberapa kondisi yang membuat kerjasama pertahanan dapat dijalankan (Susdarwono & Rizal, 2022), yaitu:

1. Dari segi waktu, kerjasama pertahanan umumnya tergolong dalam kerjasama berkala yang ada periode tertentu dikarenakan sifatnya yang formal dan melalui perjanjian sehingga di dalam perjanjiannya akan disebutkan jangka waktu kerjasama tersebut dan dapat diperpanjang lagi jika ada kesepakatan. Tetapi ada juga kerjasama yang sifatnya hanya sementara berdasarkan lamanya operasi yang dilakukan
2. Dari segi lingkungan wilayah, bentuk kerjasama pertahanan memiliki sifat regional dan internasional. Jika kerjasama pertahanan dibentuk untuk kebutuhan latihan seperti latihan tempur dan latihan perang, pada umumnya akan disepakati terlebih dahulu ruang lingkupnya secara konkrit dalam kesepakatannya dengan tujuan agar operasinya tidak melewati batas yang disepakati karena hal tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap kondisi keamanan nasional di negara yang terdampak. Ruang lingkupnya akan dijelaskan melalui peta geografi dengan harapan semua pihak yang terlibat mematuhi kesepakatan tersebut (Susdarwono & Rizal, 2022).

### **3. Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Secara konsep, kebijakan luar negeri biasanya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara atau pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan sesuatu atau mengubah sesuatu dalam lingkup internasional. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang definisi dari kebijakan luar negeri. Menurut Holsti (1992), kebijakan luar negeri merupakan perilaku atau tindakan suatu negara yang dijadikan sebagai politik luar negeri yang dibuat oleh pembuat

keputusan dalam mengatasi masalah atau usaha untuk membawa perubahan di lingkungan internasional Prakash Chandra mengatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan kegiatan komunitas yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh dan mengubah perilaku negara lain serta bagaimana komunitas tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal dengan tujuan untuk mempertahankan negara dan menjaga stabilitas internasional (Affianty, 2015). Modelski (1962) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai sistem di mana keputusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan (Dugis, 2021). Hermann (1990) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai program yang dibuat oleh pembuat keputusan atau perwakilannya yang berfokus pada tujuan atau masalah yang ditujukan ke pihak yang berada di luar yurisdiksi politik pembuat kebijakan (Haesebrouck & Joly, 2021).

Berdasarkan banyak definisi dari kebijakan luar negeri yang dikutip dari beberapa sumber di atas, Peneliti mengambil definisi yang paling cocok berdasarkan penelitian ini, definisi yang diambil adalah Holsti (1992) yang secara garis besar menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah perilaku atau tindakan suatu negara yang dijadikan sebagai politik luar negeri oleh pembuat keputusan dengan tujuan mengatasi masalah atau upaya untuk membawa perubahan dalam sistem internasional.

Menurut K.J.Holsti (1992), perlu diketahui alasan sebuah negara dalam membuat suatu kebijakan luar negeri untuk dipertahankan atau diubah. Menurutny, alasan kebijakan luar negeri dibentuk karena kepentingan suatu negara yang biasanya untuk memajukan sistem perekonomian, keamanan, dan juga kesejahteraan rakyatnya (Affianty, 2015). Secara umum, perubahan kebijakan luar

negeri dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu perubahan yang muncul karena adanya perubahan rezim oleh pemimpin negara, dan perubahan yang muncul ketika rezim yang ada sedang berjalan ingin mengubah kebijakan luar negerinya karena ada faktor internal atau eksternal yang menuntut untuk mengubah kebijakan luar negerinya (Dugis, 2021).

Menurut Holsti (1982), perubahan kebijakan luar negeri biasa muncul karena negara memberi tanggapan terhadap munculnya ancaman, tetapi ancaman yang dimaksud tidak sepenuhnya mengenai ancaman militer, tetapi bisa dalam aspek budaya, lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Proses yang bermacam-macam dan ketergantungan yang semakin meningkat pada umumnya mampu menimbulkan ancaman tersebut. Maka dari itu, perubahan dapat dikarenakan adanya kewaspadaan militer, keadaan domestik dan eksternal mengenai ekonomi, konsekuensi sosial dari modernisasi, ketergantungan, ideologi yang berlawanan antar faksi, xenofobia, neokolonialisme, nasionalisme, dan lain sebagainya (Shaltout, 2018).

Dalam kebijakan luar negeri, ada 3 tingkatan analisis jika dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan fokus analisis yang berbeda. 3 tingkatan ini adalah tingkat Analisa Individu, Analisa Negara atau Domestik, dan tingkat Analisa Sistem. Dari 3 tingkatan ini, penulis akan menggunakan tingkat Analisa Negara atau Domestik sebagai tingkat Analisa yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tingkat Negara atau Domestik yaitu:

Tingkat Analisa Negara (Domestik)

Tingkat Analisa ini memiliki fokus pada faktor-faktor dalam negara atau domestik yang mendorong negara untuk mengubah kebijakan luar negerinya secara spesifik. Dalam tingkat Analisa ini, faktor-faktor domestik yang dapat dilihat adalah sistem kelembagaan yaitu bagaimana hubungan dalam suatu lembaga pemerintahan berhubungan satu sama lain, negara yang bersifat demokrasi atau tidak, entitas penting dalam negeri, kondisi ekonomi, dan juga sejarah serta budaya dalam negara tersebut. Volgy & Schwarz (1994) juga mengatakan bahwa perubahan kepemimpinan juga mampu memberikan perubahan terhadap kebijakan luar negeri (Haesebrouck & Joly, 2021). Dalam tingkat ini akan menjelaskan bagaimana kondisi internal suatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Affianty, 2015)

Peneliti akan menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Filipina merubah arah politik luar negerinya yang sebelumnya lebih berpihak ke Cina di masa pemerintahan Rodrigo Duterte dan sekarang lebih berpihak ke Amerika Serikat di masa pemerintahan Bombong Marcos Jr. Berdasarkan tingkat analisisnya, Peneliti akan menggunakan tingkat Analisa Negara dan Sistem untuk menjelaskan faktor-faktor internal Filipina dan juga masuknya tekanan eksternal dari negara lain yang membuat Filipina melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Amerika Serikat.

#### **4. Teori Regional Security Complex**

Teori *Regional Security Complex* merupakan teori yang dikembangkan di tahun 1983 di Sekolah Kopenhagen di Denmark oleh Buzan dan Waever. Di dalam penelitian mereka tentang keamanan, hal yang dipertanyakan adalah mengenai pendekatan umum yang digunakan yang hanya berfokus dalam sudut pandang

politik dan militer saja, tetapi mereka menggunakan pandangan yang lebih luas yaitu keamanan seharusnya dilihat dari lima aspek, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sadurski, 2022).

Keamanan Regional merupakan konsep yang merujuk pada sistem keamanan dengan skala regional atau Kawasan tertentu, tidak hanya dalam skala negara secara individu saja. Keamanan regional juga biasa disebut dengan keamanan bersama yang bersifat internasional atau antar bangsa (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020). Menurut pembuat teori ini, konsep keamanan regional merupakan dasar dalam menganalisis keamanan, karena menurutnya, konsep keamanan nasional masih terlalu sempit, sedangkan keamanan internasional jangkauannya lebih luas karena banyak hubungan antar negara yang terlibat. Keamanan regional menjadi perantara untuk keamanan nasional dan global, menjadi pengaruh untuk sebagian besar pembentukan keamanan internasional (Sadurski, 2022).

Di dalam *Regional Security Complex Theory* yang dikemukakan oleh Barry Buzan menyatakan bahwa teori ini adalah teori kewanaman regional yang menjelaskan tentang kemungkinan suatu negara meneliti dan menjelaskan dinamika negara-negara dalam suatu Kawasan. Dalam arti lain, teori ini menjelaskan tentang negara-negara dalam satu Kawasan dapat mempengaruhi negara lainnya dalam bidang keamanan.

Dalam *Regional Security Complex*, masalah keamanan yang dihadapi oleh negara-negara yang berkaitan, memiliki hubungan yang kuat sehingga keamanan nasional suatu negara tidak mungkin muncul jika tidak ada perhitungan tentang keamanan wilayah atau regionalnya. Buzan juga menjelaskan bahwa meskipun ada

ketergantungan antar negara, bukan berarti akan tetap menjalani hubungan yang baik dalam satu kawasan karena akan selalu ada pengaruh dari banyak hal seperti adanya keseimbangan kekuatan, negara yang beraliansi, ataupun adanya pihak luar yang masuk dalam kawasan tersebut, sehingga teori ini menjelaskan ada 2 pola hubungan antar negara di dalam suatu kawasan, yaitu *Amity* dan *Enmity*. *Amity* berarti hubungan yang terbangun karena adanya dukungan, kesamaan kepentingan, dan juga konservasi dari negara negara yang ikut serta. *Enmity* merupakan hubungan yang terbangun karena adanya rasa curiga dan kecemasan satu sama lain. Singkatnya, pola hubungan *Amity* mampu menciptakan keamanan yang kuat di suatu kawasan, sedangkan pola hubungan *Enmity* lebih berpotensi untuk menciptakan konflik (Prayoga et al., 2023). Pola hubungan *Amity* dan *Enmity* bisa ada dan membesar dikarenakan berbagai alasan yang tidak dapat dimengerti hanya dengan berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan atau *distribution of power* saja, tetapi, bisa ada dikarenakan alasan alasan yang lebih mendalam, contohnya perselisihan tentang perbatasan negara, keperluan dan kebutuhan dari etnis tertentu, penggolongan ideologi dan hal yang diwariskan secara historis yang memiliki sifat baik ataupun tidak, serta adanya pemisahan kekuasaan di kawasan atau wilayah tertentu oleh negara negara yang terlibat (Muti et al., 2015).

Ada 3 evolusi dalam teori *Regional Security Complex* menurut Buzan yang memiliki kemungkinan ada setelah menanggapi sistem keamanan di dalam kawasan, yaitu:

- a.) *Maintenance of the Status Quo*, berarti perubahan yang cukup besar tidak terjadi dalam kondisi keamanan dalam kawasan

- b.) *Internal Transformation*, berarti perubahan terjadi dalam sistem keamanan secara internal, contohnya terbentuknya pola *amity* atau *enmity* dalam suatu kawasan karena adanya pergeseran kekuatan besar atau perbedaan kepemimpinan
- c.) *External Transformation*, berarti adanya ekspansi dalam batasan kawasan, contohnya bertambahnya keanggotaan (dalam hal ini adalah negara) dalam kawasan yang mungkin dapat memberikan perubahan dasar pada sistem keamanan dalam kawasan (Noviryani, 2016).

Di dalam teori ini, dijelaskan bahwa keamanan regional adalah sistem keamanan yang terpusat dalam wilayah-wilayah yang terbentuk secara geografis, di mana masalah keamanan dalam satu kawasan cenderung muncul dan mempengaruhi keamanan di negara lain yang berada di kawasan tersebut (Bakry, 2022). Maka dari itu, kompleks keamanan dapat berubah dengan tiga cara, yaitu mempertahankan kondisinya, adanya perubahan secara internal, dan adanya perubahan secara eksternal.

Buzan dan Waever menyebutkan bahwa ada 2 variabel yang menyusun inti dari teori *Regional Security Complex*, yaitu variabel internal dan juga variabel eksternal seperti yang sudah disebutkan di atas. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur variable internal dan juga variable eksternal (Villegas, 2022), yaitu:

1. Variabel internal:
  - a. Letak Geografis

Dengan menjadikan letak geografis sebagai parameter, dapat dilihat apakah negara negara dengan kesamaan letak geografis dapat menjalin hubungan keamanan bersama atau tidak.

b. Interaksi antar negara

Untuk interaksi antar negara, dapat dilihat dari seberapa sering atau seberapa jarang interaksi antar negara yang berada di satu kawasan sehingga bisa dikatakan dekat atau atau tidak saling mengenal.

c. Kesamaan sistem

Parameter kesamaan sistem dapat dilihat dari adanya kesamaan sistem baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya antar negara yang berada di satu kawasan. Kemungkinan untuk terjalin hubungan akan semakin besar jika kesamaan yang dimiliki juga semakin banyak dan semakin kompleks (Villegas, 2022)

2. Variabel eksternal:

a. Situasi internasional

Parameter ini memandang keadaan atau situasi dunia internasional, keadaan atau situasi yang menunjukkan apakah negara negara di satu kawasan tertentu didukung untuk membentuk pengaturan keamanan dalam *Regional Security Complex*.

b. Isu-isu yang sedang berkembang

Parameter ini memandang isu isu yang sedang berjalan, di mana isu isu yang sedang berjalan tersebut dapat berpotensi untuk negara negara yang terlibat

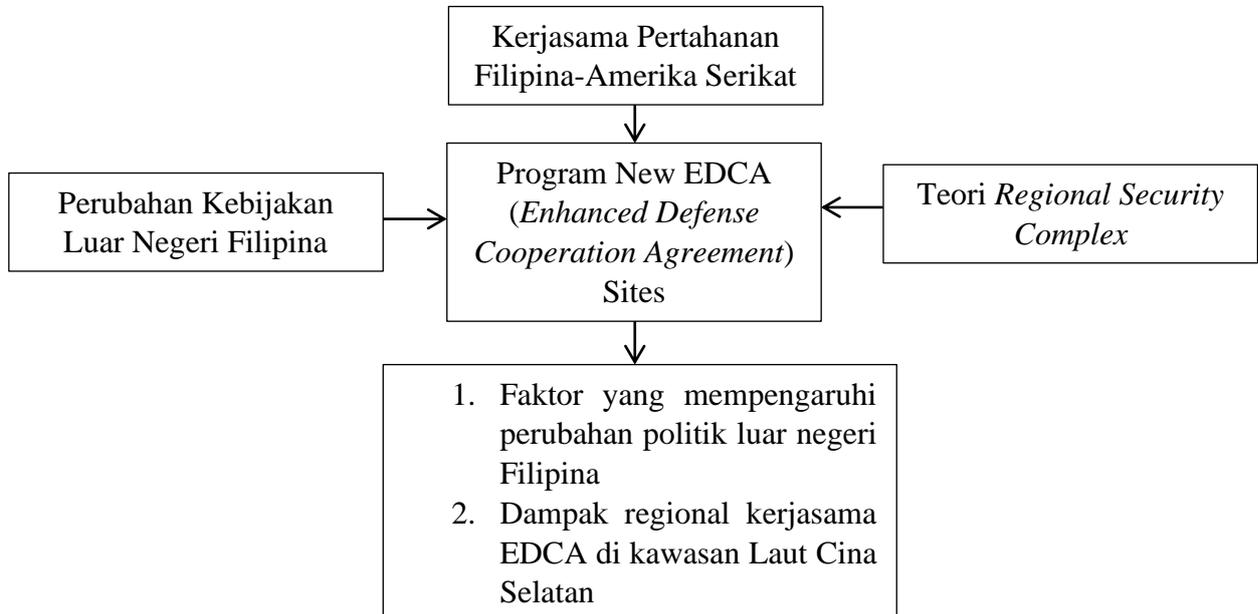
menciptakan kerjasama di dalam kawasan termasuk pengaturan keamanan atau tidak.(Villegas, 2022).

Teori ini akan digunakan peneliti untuk menjelaskan sistem keamanan di kawasan Laut Cina Selatan dengan mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi melalui program EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) sehingga membentuk pola keamanan atau konflik dalam kawasan Laut Cina Selatan. Melalui teori ini, berdasarkan pola yang dijelaskan oleh Barry Buzan, peneliti akan menjelaskan apakah dengan dibukanya kerjasama EDCA akan menciptakan pola *Amity* atau *Enmity* di kawasan Laut Cina Selatan.

#### **E. Skema Kerangka Konseptual Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengaplikasikan konsep dan teori, antara lain, teori *Regional Security Complex*, konsep perubahan kebijakan luar negeri, dan kerjasama pertahanan.

### Bagan 1. Kerangka Konseptual Penulisan



*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Dalam bagan penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep yang digunakan dalam penelitian. Pertama, peneliti akan menjelaskan tentang konsep perubahan kebijakan luar negeri yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara merubah arah politik luar negerinya, dalam penelitian ini negara yang dimaksud adalah Filipina. Kedua, peneliti akan menjelaskan tentang konsep kerjasama internasional dan diplomasi pertahanan yang dilakukan melalui kerjasama pertahanan antar kedua negara. Ketiga, peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang dipakai peneliti yaitu *Regional Security Complex Theory*. Keempat, peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai studi kasus dalam penelitian yaitu kawasan Laut Cina Selatan, sejarah hubungan Amerika Serikat dan Filipina, serta program New EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*). Setelah membahas gambaran umum, peneliti akan

membahas tentang rumusan masalah, yang pertama adalah alasan Filipina mengubah arah politik luar negerinya yang sebelumnya lebih ke Cina kemudian ke Amerika Serikat. Selanjutnya peneliti akan membahas tentang dampak dari kerjasama EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) di kawasan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dalam penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis dan interpretasi teks, wawancara, dan observasi untuk menemukan pola-pola yang bermakna yang menggambarkan fenomena tertentu. Peneliti menggunakan metode deduktif yang berarti gagasan-gagasan awal yang dijelaskan secara umum ke hal yang khusus. Dalam penelitian ini, gagasan awalnya adalah isu Laut Cina Selatan yang sudah menjadi isu umum bagi dunia internasional kemudian dibahas secara khusus terkait respon negara yang ikut terlibat dalam isu tersebut yaitu Amerika Serikat dan Filipina yang menjalankan kembali hubungannya berdasarkan perjanjian EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) serta dampaknya terhadap keamanan regional Laut Cina Selatan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui bacaan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti dari buku, jurnal, artikel,

serta sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data yang sebagian besar didapat oleh jurnal dan artikel internasional dan nasional mengenai program EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) dan dinamika keamanan regional di Laut Cina Selatan, informasi tentang operasi militer Amerika Serikat dan Filipina di wilayah tersebut, informasi tentang basis, infrastruktur, dan aktivitas yang berhubungan dengan program New EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*), dan informasi mengenai dinamika keamanan regional di Laut Cina Selatan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber seperti jurnal, buku, artikel di internet berupa narasi ataupun video dan sumber bacaan lainnya yang mendukung proses penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) di mana data-data yang dikumpulkan berasal dari bacaan. Biasanya terdapat 2 jenis penelitian perpustakaan, yang pertama adalah sistem tertutup, di mana sistem ini tidak memperbolehkan peneliti untuk membawa, mengambil, ataupun meminjam sumber bacaan. Peneliti hanya diperbolehkan untuk melihat nama buku, penulis, dan informasi lainnya pada daftar yang sudah disediakan. Sedangkan untuk sistem terbuka, peneliti diperbolehkan untuk menggunakan buku yang ingin dibaca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis yang kedua di mana peneliti diperbolehkan untuk meminjam sumber bacaan dan

mengambil isi sumber yang cocok dengan penelitian lalu diparafrase sehingga tidak menimbulkan plagiarisme.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang berarti peneliti ingin menjelajahi lebih dalam dan luas terhadap isu yang akan diteliti, serta disajikan secara komprehensif berdasarkan data yang diambil menjadi sebuah kesimpulan oleh peneliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjeleajahi lebih dalam mengenai program New EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) serta dampak program tersebut terhadap keamanan regional di kawasan Laut Cina Selatan. Melalui Teknik ini peneliti akan melakukan penarikan analisis dari mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari data sekunder untuk menemukan hasil penelitian yang kredibel dan hasil yang optimal.

#### **5. Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan** mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka** mencakup deksripsi dari variabel terkait yang ingin diteliti. Di dalam bab ini mencakup konsep Kerjasama Internasional, Kerjasama Pertahanan, dan juga Teori *Regional Security Complex*.

**BAB III Gambaran Umum** mencakup gambaran umum tentang studi kasus yang diangkat dalam penelitian, yaitu Kawasan Laut Cina Selatan,

Hubungan Amerika Serikat dan Filipina, dan Program EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*).

**BAB IV Analisis dan hasil penelitian** mencakup hasil penelitian yang telah dikaji atau diteliti dengan data-data yang telah dikumpulkan. Di dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah penelitian menggunakan data yang diambil dari *library research* atau penelitian kepustakaan.

**BAB V Kesimpulan dan Saran** Mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikaji berdasarkan rumusan masalah penelitian dan saran penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kerjasama Internasional**

Di dalam paradigma besar Hubungan Internasional, kerjasama memiliki penjelasan yang berbeda berdasarkan perkembangan paradigma yang dominan di Ilmu Hubungan Internasional. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmuwan dalam melihat konsep kerjasama antar negara juga semakin beragam, hal ini terjadi melalui proses perdebatan yang panjang antar kaum yang memiliki cara pandang atau paradigma yang berbeda satu sama lain. Dalam hubungan internasional, paradigma yang terkenal adalah paradigma kaum Realis yang menganut paham realisme dan kaum Liberalis yang menganut paham liberalisme. Kedua paradigma tersebut kemudian berkembang dan memiliki aliran masing masing di mana alirannya pun memiliki cara pandang tersendiri dalam konsep kerjasama internasional.

Menurut kaum Realis, konsep kerjasama internasional merupakan suatu konsep yang lebih sulit dibangun dan negara cenderung menghasilkan konflik, hal ini dikarenakan asumsi dasar dari realisme adalah sifat buruk manusia yang selalu memandang bahwa negara selalu diikuti rasa curiga, cemas, atau prasangka buruk terhadap tujuan negara lain dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Namun, realisme tidak mengatakan bahwa kerjasama antar negara tidak dapat terjadi, hanya saja peluang terjadinya tidak besar, adapun terjadi, kerjasama hanya akan menimbulkan adanya pihak yang untung dan pihak yang rugi. Di sisi lain, kaum liberalis melihat bahwa, kerjasama antar negara lah yang justru melihat bahwa konsep kerjasama internasional akan menimbulkan semua pihak untung

dikarenakan, liberalisme melihat bahwa meskipun kerjasama antar negara terjadi, masing masing negara masih tetap mengutamakan kepentingan negaranya, karena kepentingan negaranya inilah terbentuk kerjasama yang akan saling memberikan kebutuhan satu sama lain sehingga semua pihak saling menguntungkan (Rosyidin, 2020)

Dari masing masing paradigma di atas, kemudian lahir aliran yang juga melihat konsep kerjasama internasional dengan pandangan yang sedikit berbeda, di mana aliran aliran setelahnya memberikan sedikit kritikan terhadap pandangan pendahulunya. Di sisi realisme, muncul aliran yaitu neo-realisme, aliran ini melihat konsep kerjasama internasional justru muncul karena tujuan utama negara adalah keamanan, sehingga neo-realisme percaya bahwa keamanan juga dapat tercapai dengan adanya kerjasama. Di sisi liberalisme, ada aliran yang bernama liberalisme-interdependensi, aliran ini lebih melihat ketergantungan antar negara dapat mengurangi peluang terjadinya konflik (Rosyidin, 2020).

Kerjasama Internasional merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang sudah merdeka dalam mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini bersifat saling menguntungkan untuk semua pihak dalam konteksnya adalah semua negara yang menjalin kerjasama. Kerjasama Internasional bisa berjenis bilateral maupun multilateral (Amanullah, 2021). Kerjasama Internasional secara umum mencakup kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan yang berdasar pada politik luar negeri dari tiap negara (Trisna, 2022)

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan hasil dari timbulnya ketergantungan atau interdependensi antara negara-negara yang

terlibat melalui hubungan yang terjalin. Ketergantungan atau interdependensi tersebut muncul karena adanya hambatan atau kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam konteks hubungan internasional (Tombalisa et al., 2022)

Dalam kerjasama internasional, kesepakatan antar negara yang terlibat harus diberlakukan agar kerjasama tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan yang berlaku. Pada awalnya, kerjasama internasional hanya dipahami sebagai hubungan kerjasama antar negara saja, tetapi seiring berjalannya waktu, aktor yang berperan dalam kerjasama internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga aktor non-negara atau (*Non-State Actor*) seperti Organisasi Non-Pemerintahan (*Non-Governmental Organization*) atau biasa disingkat NGO (Wulan, 2022).

Di dalam hubungan internasional, ada pendapat yang mengatakan bahwa kerjasama perlu hubungan yang tidak simetris yang berarti dalam kerjasama perlu adanya negara yang sangat berpengaruh, contohnya adalah Amerika Serikat. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Keohane, yang mengatakan bahwa kerjasama tidak selamanya memerlukan kekuatan dari negara yang berpengaruh, walaupun pada awalnya mungkin memiliki ketergantungan kepada negara yang berpengaruh, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rezim internasional mampu mengembangkan kepentingan sendiri bahkan jika kekuatan hegemoni/negara yang berpengaruh mengalami penurunan, dan kerjasama tersebut disebut kerjasama Non-Hegemonik atau Post-Hegemonik, yang walaupun sulit, tetapi memiliki kemungkinan untuk terjadi (Erdmann et al., 2013).

## **B. Kerjasama Pertahanan**

Konsep diplomasi baru baru ini sudah banyak yang muncul, termasuk diplomasi pertahanan di mana bentuk diplomasi ini telah menyita perhatian banyak

negara dan ingin masuk dengan tujuan untuk sistem pertahanan dan keamanan negaranya. Dalam beberapa penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa jika berhubungan dengan pertahanan maka menjadi bagian dari diplomasi pertahanan dan juga sedang berkembang dan sudah bergerak ke dalam diplomasi secara utuh. Diplomasi pertahanan telah berkembang menjadi bentuk diplomasi baru dalam hubungan internasional, yang didukung oleh berbagai bentuk teknologi dan juga perkembangan media sosial. Diplomasi pertahanan juga berkembang menjadi konsep diplomasi dan mendominasi berbagai gagasan diplomasi lainnya. Dalam penerapannya, kerjasama pertahanan memperluas cakupan bidang di dalam pertahanan itu sendiri, yaitu dalam wilayah, publik, maritim, latihan bersama, dan peralatan pertahanan hingga menjadi diplomasi total. Pengembangan diplomasi pertahanan telah berubah menjadi diplomasi secara keseluruhan, yang dilaksanakan melalui aktivitas pelatihan bersama secara bilateral atau multilateral dengan berbagai negara besar (Khadafi et al., 2023).

Istilah ini masih tergolong baru dengan akar yang kuat terkait dengan kebutuhan akan bahasa politik baru yang menggambarkan kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional pasca berakhirnya Perang Dingin. Meskipun tidak sedikit digunakan dalam debat politik dan ilmu pengetahuan, istilah ini masih kurang memiliki definisi yang diakui secara universal. Berbagai negara berusaha memberikan pengertian padanya, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan keamanan mereka sendiri. Peran yang semakin berkembang dari diplomasi pertahanan, sebagai alat untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri negara, juga mengakibatkan penggantian istilah yang selama ini banyak digunakan, yaitu

"diplomasi militer", yang secara intrinsik sempit dalam arti dan tidak sama sekali dalam tujuan atau potensi dari yang sebelumnya (Drab, 2018).

Istilah "Diplomasi pertahanan" muncul dari kebutuhan politik setelah Perang Dingin untuk menggambarkan peran yang semakin berkembang dari struktur-struktur di bawah kementerian pertahanan nasional dalam lingkungan internasional yang lebih damai. Meskipun digunakan secara luas dalam diskusi politik dan praktik diplomatik, definisi yang tepat masih belum disepakati secara universal. Banyak negara mencoba mendefinisikan diplomasi pertahanan sesuai dengan kebutuhan dan situasi keamanan mereka sendiri. Meskipun ada pemahaman umum bahwa diplomasi pertahanan berkontribusi pada kepercayaan dan pemahaman dalam hubungan internasional, masih ada tantangan dalam mencapai definisi yang tepat karena kompleksitas situasi keamanan yang berbeda di berbagai wilayah dan budaya. Meskipun demikian, diplomasi pertahanan diakui sebagai alat penting dalam mendukung kepentingan dan kebijakan luar negeri serta keamanan nasional suatu negara (Drab, 2018).

Pemahaman kontemporer tentang konsep diplomasi pertahanan dikenali dengan banyak definisi dan aktivitas internasional yang berkaitan, yang dilandaskan pada dialog dan kerja sama, yang diadakan oleh kementerian pertahanan. Objektifnya adalah membangun dan menjalankan prosedur keamanan negara, dengan tugas membangun hubungan dan kerja sama yang seimbang dan berkepanjangan yang mendorong transparansi dalam bidang pertahanan, memperkuat kepercayaan, dan mencapai tujuan bersama. Salah satu instrumen penting diplomasi pertahanan adalah menjaga dialog dengan mitra sebagai alat komunikasi dan langkah pembangunan kepercayaan (Drab, 2018).

### **C. Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Munculnya minat untuk membahas perubahan dalam aspek hubungan internasional muncul di tahun 1970-an dan terus berkembang hingga tahun 1980-an. Di Tahun 1990-an minat ini dilanjutkan lagi dan banyak yang terinspirasi oleh kejadian runtuhnya Uni Soviet sehingga banyak perhatian yang meningkat terhadap fenomena perubahan kebijakan luar negeri baik dari jenis, variabel yang mempengaruhi, dan yang terpenting adalah alasan yang memotivasi munculnya perubahan (Shaltout, 2018).

Rosenau merupakan yang pertama dari banyak pakar di bidang hubungan internasional yang memberikan penjelasan tentang perubahan dalam kebijakan luar negeri. Rosenau (1990) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri secara mendasar adalah cara kerja bagi negara untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di ruang lingkup yang relevan. Ia juga menekankan bahwa penting bagi seorang analis untuk menetapkan tolak ukur spesifik terhadap mana perubahan yang mau diukur (Shaltout, 2018).

Dalam tingkat Analisisnya, selain tingkat Analisa Negara yang akan digunakan penulis sebagai tingkat analisa untuk meneliti, ada 2 tingkat analisa yang juga dapat digunakan dalam menganalisis faktor perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu tingkat Analisa Individu dan tingkat Analisa Sistem.

#### **a.) Tingkat Analisa Individu**

Tingkat Analisa ini memiliki fokus terhadap pemimpin dan pembuat keputusan untuk menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang dapat berasal dari kepribadian atau interpretasinya. Asumsi dalam tingkat analisa ini mengatakan

bahwa setiap individu membuat sejarah dan karena keputusan individu tersebut sehingga terjadi berbagai peristiwa (Affianty, 2015).

b.) Tingkat Analisa Sistem/Internasional

Tingkat Analisa ini memiliki fokus terhadap hubungan antar negara atau hubungan internasional yang terpengaruh oleh kapabilitas suatu negara yang relatif contohnya seperti kekuatan dan kekayaan yang memberikan dampak terhadap sistem internasional. Kapabilitas ini berarti dapat berubah kapan pun sehingga negara dapat mengalami peningkatan atau penurunan (Affianty, 2015). Hermann (1990) mengatakan bahwa sebagian besar perubahan kebijakan luar negeri diperkirakan karena adanya perubahan dari pihak eksternal. Salah satu sumber paling esensial dalam perubahan kebijakan luar negeri menurutnya adalah tekanan eksternal yaitu “peristiwa jelas dan berdampak langsung oleh penerima” (Haesebrouck & Joly, 2021).

Untuk tingkat Analisa Negara atau Domestik yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dan juga yang akan menjadi tingkat analisis peneliti juga merupakan teori konsepsi peran nasional oleh Holsti. Holsti mengembangkan kerangka teoretis dalam studinya pada tahun 1970-an mengenai peran nasional dalam studi kebijakan luar negeri untuk membantu analisis terhadap kebijakan luar negeri. Holsti berupaya untuk mengetahui bagaimana negara-negara mengambil peran tertentu dan bersikap serupa dalam sistem internasional. Opini dari Holsti adalah konsepsi peran nasional mencakup pengertian para pembuat kebijakan mengenai macam-macam keputusan, komitmen, aturan, dan perbuatan yang cocok untuk negara mereka juga fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan negara secara berkelanjutan dalam sistem internasional atau dalam sistem regional subordinat (Seeters, 2017)

#### **D. Teori Regional Security Complex**

Teori *Regional Security Complex* merupakan teori yang dikembangkan di tahun 1983 di Sekolah Kopenhagen di Denmark oleh Buzan dan Waever. Di dalam penelitian mereka tentang keamanan, hal yang dipertanyakan adalah mengenai pendekatan umum yang digunakan yang hanya berfokus dalam sudut pandang politik dan militer saja, tetapi mereka menggunakan pandangan yang lebih luas yaitu keamanan seharusnya dilihat dari lima aspek, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sadurski, 2022).

Teori *Regional Security Complex* muncul sebagai kontribusi yang memiliki ciri khas tersendiri yang diarahkan dari konsep keamanan sosial dan sekuritisasi oleh Sekolah Copenhagen. Teori ini muncul setelah adanya perdebatan filsafat mengenai pendekatan atomistik dan holistik yang menjelaskan cara memahami suatu fenomena dengan mempelajari bagian bagian komponen sistem atau hanya melihat secara keseluruhan saja (Soltani et al., 2015). Sebelumnya, pendekatan paling dominan yang digunakan dalam analisis hubungan internasional berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Waltz yaitu *Theory of International Politics* adalah pendekatan sistem di mana dalam beberapa kasus, pendekatan ini dinilai kurang efektif karena tidak dapat menjelaskan alasan terjadinya suatu fenomena. Oleh karena itu, Sekolah Kopenhagen, sebagai sekolah realis, melihat tingkat sistem mengalami tiga kelemahan dalam studi keamanan. Pertama, ia memperbesar pentingnya polaritas dan masalah keamanan, sehingga mengabaikan masalah dengan implikasi regional. Kedua, neorealisme sering kali fokus pada keamanan militer dalam negara dan mengabaikan konstruksi sosial wilayah dan keamanan (Al-Jader & Jaafar, 2022).

Di dalam buku “*Man, the State and War*” Waltz mengatakan di dalam bukunya bahwa ada 3 tingkat level analisis, yaitu sifat manusia, sifat negara, dan sifat sistem internasional di mana ketiganya berjalan di bawah struktur anarkis sistem internasional dan menurut Waltz pendekatan sistem adalah yang berpengaruh dalam mempelajari tingkat analisis dalam hubungan internasional. Namun, Teori *Regional Security Complex* yaitu Sekolah Copenhagen yang mengatakan bahwa level analisisnya lebih ke tingkat analisis daripada tingkat individu dan sistem, karena dalam konsep sekuritisasinya memiliki tujuan utama yaitu memahami siapa, mengapa, dan dalam kondisi apa isu-isu menjadi dipercayakan keamanannya. Teori *Regional Security Complex* berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat analisis regional memberikan penjelasan yang lebih baik tentang fenomena dalam hubungan internasional (Soltani et al., 2015).

Konsep keamanan kompleks memberikan inspirasi dalam penulisan buku yaitu *Regions and Power: The Structure of International Security*, dengan tujuan memberikan sudut pandang baru dalam studi hubungan internasional. Tingkat keamanan regional diperkenalkan oleh Buzan dan Waever sebagai alat penting dalam memahami politik internasional, terlebih pasca berakhirnya Perang Dingin. Dalam analisisnya, Teori *Regional Security Complex* menggunakan pola pertemanan dan permusuhan sebagai variabel independen yang menentukan sifat dalam hubungan keamanan. Dalam teori ini juga terdapat akar konstruktivis karena interpretasi negara-negara berdasarkan pola pertemanan dan permusuhan negara-negara menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam tingkat analisis regional (Soltani et al., 2015).

Menurut tingkat analisis RSC, campuran sejarah, politik, dan kondisi materi di setiap wilayah membentuk pola keamanan dan ketidakamanan yang lebih khusus. Berdasarkan pendapat Buzan dan Wæver, keamanan adalah apa yang dilakukan negara berdasarkan pola pertemanan dan permusuhan juga hubungan kekuatan di setiap RSC. Oleh karena itu, bagi mereka, ada empat tingkatan dalam pembentukan RSC: kondisi domestik negara-negara di wilayah tersebut (termasuk kekuatan dan kelemahan); hubungan antar-negara yang membentuk RSC; hubungan antar-wilayah terutama dengan yang berdekatan; dan akhirnya peran kekuatan global dalam RSC (Soltani et al., 2015).

Di setiap kawasan, masuknya kekuatan besar dalam hal ini adalah negara *super power* terjadi saat salah satu aktor dalam kawasan yang menjadi pesaing mengundang masuk dengan alasan untuk keseimbangan kekuatan. Adanya kekuatan dari luar kawasan menghubungkan pola keamanan lokal dan global. Pola keamanan sebetulnya berasal dari faktor-faktor asli setiap negara di dalam kawasan, kekuatan dari luar hanya bisa memberikan pengaruh saat negara-negara di dalam kawasan yang bersaing bergantung pada kekuatan luar tersebut (Soltani et al., 2015).

Teori *Regional Security Complex* merupakan teori yang berkembang pasca perang dingin di mana kontribusinya dalam hubungan internasional adalah dengan melihat sistem keamanan dalam fenomena internasional dapat dilihat dalam tingkat analisis regional di mana teori ini muncul karena 3 tingkat analisis sebelumnya yaitu individual, unit, dan sistem tidak cukup untuk menjelaskan era pasca perang dingin.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi fondasi dalam menyusun penelitian ini. Bagian ini memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penelitian sebelumnya mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan isu-isu yang relevan dengan penelitian. Di bagian ini penulis akan memaparkan berbagai studi yang berhubungan dengan topik penelitian, metodologi penelitian, serta mengidentifikasi temuan utama dan kesimpulan yang telah dicapai oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul “*The 21st Century Philippine-US Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA): The Philippines' Policy in Facilitating the Obama Administration's Strategic Pivot to Asia*” oleh Renato Cruz De Castro tahun 2014. Artikel ini mengkaji faktor-faktor di balik dukungan langsung pemerintahan Aquino terhadap kebijakan *rebalancing* ke Asia oleh pemerintahan Obama, saat mereka merundingkan dan menandatangani perjanjian kerangka kerja tentang kerjasama EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) dengan Amerika Serikat. Penelitian ini membahas tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Filipina atas tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan dan dijelaskan menggunakan konsep *rebalancing* atas keterlibatan kekuatan besar di dalam kawasan yaitu Cina dan Amerika Serikat.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “*Motivasi Filipina Melakukan Kerjasama Pertahanan dan Keamanan dengan Amerika Serikat Dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Tahun 2014*” oleh Shindy Apvionita Ebri tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang faktor internal dan faktor eksternal Filipina sehingga membuka kerjasama pertahanannya bersama

Amerika Serikat dengan menggunakan konsep *national interest*. Penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang membuat EDCA pertama kali dibentuk di tahun 2014 saat masa pemerintahan Benigno Aquino III.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang berjudul “*Post-Duterte Philippine Foreign Policy Framework to The Marcos Flexible Foreign Policy: Engaging The World Peacefully Multilaterally*” oleh Wendell Glenn Cagape tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang politik luar negeri Duterte dan Marcos sebagai penerusnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kedua Presiden terhadap hubungannya dengan negara besar seperti Amerika Serikat dan Filipina menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian keempat adalah penelitian yang berjudul “Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global” oleh Nurul Husna, Mohammad Rosyidin dan Muhammad Faizal Alfian tahun 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian oleh penulis yang menggunakan konsep dan metode penelitian yang sama yaitu perubahan kebijakan luar negeri serta metode penelitian yang menggunakan tingkat Analisa Domestik yang sebagian besar membahas tentang perbedaan kebijakan di setiap rezim. Namun, dalam penelitian oleh penulias akan menambahkan beberapa faktor internal dalam tingkat analisisnya.

Dari berbagai sumber bacaan yang dijadikan referensi oleh Penulis, terdapat fokus penelitian yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya serta studi kasus yang berbeda. Pertama, penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor dari Filipina secara eksternal dan internal yang mendorong awal terbentuknya

kerjasama EDCA di tahun 2014. Kedua, penelitian sebelumnya tidak membahas tentang dampak dari kerjasama EDCA di kawasan regional sebagaimana konflik terjadi di kawasan regional Laut Cina Selatan.

Kurangnya pembahasan dan fokus tersebut memberikan kesempatan bagi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai perubahan arah politik luar negeri Filipina yang di masa Rodrigo Duterte yang lebih berpihak ke Cina ke masa Bongbong Marcos Jr. yang lebih ke Amerika Serikat sehingga kemudian dibuka kembali kerjasama pertahanan EDCA oleh kedua negara serta dampak dari kerjasama ini secara regional.